# Hubbul Wathan dalam Demokrasi: Pemuda Ansor dan Gerakan Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Oleh:

**IKBAL AL AMBARI**

Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang dan Kader GP Ansor

Sebagai Pengawas Pemilu sekaligus kader GP Ansor, saya sering melihat dua ruang yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan: pengawasan pemilu dan kehidupan kebangsaan. Di satu sisi, saya memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, sebagai kader Ansor, saya meyakini bahwa menjaga demokrasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Dari dua posisi tersebut, saya sampai pada sebuah pertanyaan sederhana: apakah mencintai tanah air (hubbul wathan) dapat diwujudkan melalui kerja-kerja pencegahan pemilu?

Bagi saya, jawabannya adalah iya.

Bahkan, dalam konteks demokrasi Indonesia hari ini, menjaga pemilu agar berlangsung jujur, adil, damai, dan bermartabat merupakan salah satu bentuk konkret kecintaan terhadap tanah air. Kita sering memahami *hubbul wathan* dalam konteks kecintaan kepada bangsa dan negara. Dalam tradisi kebangsaan Nahdlatul Ulama, semangat cinta tanah air menjadi salah satu bagian penting dari cara melihat hubungan antara agama, kebangsaan, dan kehidupan bermasyarakat. Ungkapan hubbul wathan minal iman sangat populer dalam wacana kebangsaan NU, meskipun perlu ditegaskan bahwa ungkapan tersebut tidak hanya diposisikan begitu saja sebagai fatwa/maqolah para Muassis NU.

Bagi saya, substansinya jauh lebih penting: mencintai tanah air harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk menjaga kehidupan bersama.



Dalam negara demokrasi, salah satu ruang penting kehidupan bersama itu adalah pemilu.

Pemilu Bukan Sekadar Hari Pencoblosan

Dalam pengalaman saya sebagai pengawas pemilu, demokrasi tidak dimulai ketika pemilih masuk ke TPS dan tidak pula selesai ketika surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Demokrasi jauh lebih panjang dari itu. Ia dimulai ketika masyarakat memperoleh informasi politik, ketika kandidat membangun citra, ketika partai melakukan konsolidasi, ketika pemilih menentukan pilihan, hingga ketika hasil pemilu diterima oleh seluruh pihak. Karena itu, potensi persoalan juga dapat muncul jauh sebelum hari pemungutan suara.

Politik uang, kampanye yang melanggar ketentuan, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, politisasi identitas, intimidasi, hingga persoalan netralitas dapat tumbuh dalam berbagai ruang sosial. Pada titik ini, saya semakin meyakini bahwa pengawasan pemilu tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Kita harus memperkuat pencegahan.

Pencegahan bukan berarti membiarkan pelanggaran tanpa konsekuensi. Sebaliknya, pencegahan adalah upaya untuk memastikan bahwa potensi pelanggaran dapat dikenali dan diminimalkan sebelum menjadi persoalan yang lebih besar. Saya sering berpikir bahwa pencegahan adalah bentuk cinta tanah air yang bekerja sebelum masalah menjadi luka. Mengapa Pencegahan Lebih Penting? Menindak pelanggaran tentu merupakan bagian penting dari kerja pengawasan. Tetapi penindakan selalu bekerja setelah sebuah persoalan terjadi.

Pencegahan bekerja lebih awal.

Jika politik uang telah terjadi, kita memiliki mekanisme untuk menanganinya. Tetapi akan jauh lebih baik apabila masyarakat sejak awal memahami bahwa suara mereka bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Edit with WPS Office

Jika hoaks telah menyebar, kita dapat melakukan klarifikasi. Tetapi akan lebih baik apabila masyarakat memiliki kemampuan literasi yang membuat mereka tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Jika konflik akibat perbedaan pilihan politik sudah terjadi, kita dapat melakukan mediasi dan berbagai upaya penyelesaian. Tetapi bukankah lebih baik apabila sejak awal masyarakat memahami bahwa perbedaan pilihan politik tidak harus menghilangkan persaudaraan?

Di sinilah saya melihat bahwa pencegahan sesungguhnya bukan hanya kerja kelembagaan Bawaslu. Pencegahan adalah kerja kebudayaan.

Ia membutuhkan masyarakat yang sadar.

Ia membutuhkan tokoh agama yang memberikan keteladanan.

Ia membutuhkan pemuda yang aktif.

Ia membutuhkan organisasi masyarakat sipil.

Dan ia membutuhkan seluruh elemen bangsa yang memiliki kesadaran bahwa pemilu adalah milik bersama.

Di Sinilah Pemuda Ansor Memiliki Peran

Sebagai kader GP Ansor, saya melihat organisasi kepemudaan memiliki ruang yang sangat strategis dalam membangun budaya demokrasi.

Kader Ansor tidak perlu mengambil alih tugas Bawaslu. Demikian pula Bawaslu tidak mungkin bekerja sendirian menjangkau seluruh ruang sosial masyarakat. Keduanya memiliki posisi dan fungsi masing-masing.

Bawaslu memiliki mandat kelembagaan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan. Sementara organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan sosial untuk membangun kesadaran di tengah masyarakat.

Di sinilah kolaborasi menjadi penting. Kader Ansor dapat menjadi bagian dari ekosistem pencegahan melalui pendidikan politik, penguatan literasi demokrasi, dialog di tingkat masyarakat, serta membangun kesadaran agar perbedaan politik tidak berubah menjadi konflik sosial. Bagi saya, kader Ansor tidak harus menjadi pengawas pemilu untuk ikut menjaga pemilu.

Ia dapat menjadi penjaga ruang sosial tempat demokrasi berlangsung.

Ia dapat mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.

Ia dapat mendorong anak muda untuk menggunakan hak pilih secara cerdas.


Edit with WPS Office

Ia dapat menjadi jembatan dialog ketika perbedaan pilihan mulai menciptakan ketegangan. Dan yang tidak kalah penting, ia dapat memberikan teladan bahwa politik boleh keras dalam gagasan, tetapi tidak boleh kehilangan adab dalam hubungan kemanusiaan.

Nilai Aswaja dan Demokrasi

Saya melihat ada titik temu yang menarik antara nilai-nilai Aswaja dan kebutuhan demokrasi. *Tawassuth,* misalnya, mengajarkan jalan tengah dan menjauhi sikap ekstrem. Dalam politik, nilai ini penting agar perbedaan pilihan tidak membawa seseorang pada fanatisme yang berlebihan. *Tasamuh* mengajarkan toleransi. Dalam demokrasi, tidak mungkin semua orang memiliki pilihan politik yang sama. Karena itu, menghargai pilihan orang lain merupakan bagian penting dari kedewasaan berdemokrasi. *Tawazun* mengajarkan keseimbangan. Politik tidak boleh membuat kita kehilangan keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan bangsa. Sementara *i'tidal* mengajarkan sikap tegak dan adil. Dalam konteks demokrasi, ia dapat diterjemahkan sebagai keberanian untuk berdiri pada prinsip keadilan meskipun kepentingan politik di sekeliling kita begitu kuat.

Nilai-nilai tersebut menurut saya bukan sekadar konsep keagamaan. Ia dapat menjadi etika sosial dalam kehidupan demokrasi.

Sebab demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu berbeda tanpa bermusuhan, berkompetisi tanpa saling meniadakan, dan memenangkan pertarungan politik tanpa kehilangan persaudaraan.

Politik Boleh Berbeda, Ukhuwah Jangan Terbelah

Salah satu persoalan yang sering kita hadapi dalam setiap kontestasi politik adalah kecenderungan membawa pilihan politik terlalu jauh ke dalam hubungan sosial. Pilihan politik dapat membuat teman menjadi lawan. Tetangga menjadi saling curiga. Bahkan hubungan keluarga terkadang ikut terganggu. Padahal setelah pemilu selesai, kita tetap tinggal di kampung yang sama, bekerja di ruang sosial yang sama, dan menjadi bagian dari bangsa yang sama. Karena itu saya percaya bahwa demokrasi harus memiliki batas. Kita boleh berbeda dalam memilih calon. Kita boleh berdebat mengenai

Edit with WPS Office

program. Kita boleh mengkritik kebijakan. Tetapi perbedaan politik tidak boleh menghapus ukhuwah.

Bagi saya, inilah salah satu bentuk nyata hubbul wathan dalam demokrasi. Mencintai Indonesia bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Justru Indonesia menjadi kuat karena mampu mengelola perbedaan. Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan itu. Tugas kita adalah memastikan perbedaan tersebut tidak berubah menjadi permusuhan.

Pencegahan sebagai Bentuk Pengabdian Kebangsaan

Dari pengalaman saya sebagai anggota Bawaslu, saya semakin memahami bahwa pengawasan pemilu pada akhirnya bukan semata-mata persoalan prosedur. Ada manusia di balik setiap proses politik. Ada masyarakat dengan pengalaman sosial yang berbeda. Ada kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. Ada pula masyarakat yang rentan menjadi objek manipulasi politik.

Karena itu, pencegahan harus menyentuh manusia dan lingkungan sosialnya. Kita tidak cukup hanya mengatakan, "Jangan melakukan politik uang." Kita juga harus membangun kesadaran mengapa politik uang berbahaya bagi demokrasi. Kita tidak cukup hanya mengatakan, " Jangan menyebarkan hoaks." Kita harus membangun kemampuan masyarakat untuk memeriksa informasi. Kita tidak cukup hanya mengatakan, "Jangan terprovokasi." Kita harus menciptakan ruang dialog yang membuat masyarakat terbiasa menyelesaikan perbedaan secara damai. Dengan demikian, pencegahan bukan sekadar menyampaikan larangan. Pencegahan adalah proses membangun budaya demokrasi. Dan ketika kader Ansor mengambil bagian dalam proses tersebut, sesungguhnya ia sedang menerjemahkan semangat kebangsaan dalam bentuk yang sangat konkret.

Hubbul Wathan yang Harus Dihidupkan

Pada akhirnya, saya melihat hubbul wathan bukan hanya sebagai slogan tentang cinta tanah air. Ia harus hidup dalam tindakan. Jika kita mencintai Indonesia, maka kita harus menjaga persatuannya. Jika kita mencintai Indonesia, kita harus menjaga masyarakatnya dari konflik yang tidak perlu.

Edit with WPS Office

Jika kita mencintai Indonesia, kita harus menjaga agar kekuasaan diperoleh melalui proses demokratis yang jujur dan adil. Dan jika kita mencintai Indonesia, kita harus berani mencegah berbagai praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Bagi saya, sebagai anggota Bawaslu sekaligus kader GP Ansor, kedua identitas tersebut justru bertemu pada satu titik: pengabdian kepada bangsa. Sebagai pengawas, saya memiliki kewajiban kelembagaan untuk menjaga proses pemilu. Sebagai kader Ansor, saya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut merawat kehidupan kebangsaan. Keduanya bukan dua jalan yang berbeda. Keduanya dapat bertemu dalam kerja-kerja pencegahan. Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan lembaga pengawas yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang sadar bahwa menjaga pemilu adalah menjaga masa depan bangsa.

Maka, bagi saya, hubbul wathan dalam demokrasi bukan hanya tentang mencintai Indonesia secara simbolik. Ia adalah keberanian untuk menjaga ruang demokrasi agar tetap jujur, damai, adil, dan bermartabat. Kader Ansor memiliki ruang untuk mengambil bagian di dalamnya. Bukan sebagai pengganti penyelenggara pemilu. Bukan pula sebagai partisan dalam kontestasi. Tetapi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ikut memastikan bahwa perbedaan politik tidak merusak persaudaraan dan bahwa kompetisi politik tidak merusak kehidupan kebangsaan.

Sebab pada akhirnya, mencintai Indonesia berarti menjaga apa yang membuat kita tetap menjadi satu bangsa. Dan di dalam negara demokrasi, salah satu cara menjaga Indonesia adalah menjaga demokrasinya.

Hubbul wathan, dengan demikian, bukan sekadar kata. Ia adalah ikhtiar untuk merawat Indonesia termasuk merawat pemilunya.

Edit with WPS Office